

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah otonomi¹ setingkat propinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah DIY dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-Undang yang membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai otonomi tingkat Propinsi adalah Undang-undang No. 3 jo 19 tahun 1950.

Kesultanan Yogyakarta mengalami perpecahan setelah Belanda menganggap Sultan Yogyakarta tidak patuh terhadap mereka. Kerajaan Yogyakarta dipecah menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman (wilayah kekuasaan lebih sempit). Pembagian wilayah tersebut menjadi cikal bakal Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Negara Bagian dari masa penjajahan Belanda, Inggris, Hindia Belanda, dan Jepang.

Masa penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta adalah *Zelfbestuur*² dan pada masa Jepang disebut *koti/kooti*³. Status ini mengatur kewenangan untuk mengatur dan mengurus negara nya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajah.

¹ Daerah otonomi adalah daerah yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam.

² *Zelfbestuur* adalah pemerintahan sendiri, lihat <http://translet.google.co.id>

³ *Koti/kooti* adalah Kasultanan lihat Ayuk Paramitaningsih, "Terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta (1945-1951)", *Skripsi.Yogyakarta: Pendidikan Sejarah, FISE, UNY, 2010, hlm.2*

Pada jaman penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan undang-undang, melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jendral Belanda dengan Sri Sultan. Perjanjian ini dinamakan politiek-Contract. Ini berarti bahwa status Kasultanan tidak diatur secara sepihak oleh Gubernur Jendral Belanda, melainkan status Kasultanan Yogyakarta itu ditentukan oleh dua belah pihak yaitu Gubernur Jendral Belanda dan Sri Sultan.

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Kasultanan Yogyakarta memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan bangsa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII membantu para pemimpin nasional perlindungan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Republik Indonesia berdiri dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 berdampak pula terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang atas Indonesia yang berkuasa selama 3,5 tahun dari tahun 1942-1945. Tahap demi tahap pasukan Jepang ditarik mundur dari Indonesia. Tentara Sekutu dibawah pimpinan Jendral Christison kemudian mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan tujuan utama melucuti persenjataan tentara Jepang.

Kedatangan tentara Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang akan berusaha kembali berkuasa di Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno

sebagai wujud pernyataan kemerdekaan Indonesia tidak sedikitpun dihiraukan oleh Belanda. Belanda masih menginginkan kekuasaan di Indonesia.

Usaha Belanda untuk melemahkan perlawanan tentara dan rakyat bahwa presiden dan pemerintah Republik sudah tidak menentang lagi dan bersedia bekerjasama dengan Belanda. Belanda berhasil menduduki beberapa kota penting serta jalan- jalan raya. Tentara Republik mundur dari kota-kota itu setelah dikatakan berhasil 90 % melakukan politik bumihangus⁴, tetapi di Yogyakarta politik bumihangus gagal karena datangnya serangan Belanda. Pertarungan sengit terjadi di sekitar Magelang, Yogyakarta, Solo, Madiun dan Kediri. Kedudukan Belanda hanya merupakan kantong- kantong kecil yang berada ditengah-tengah kawasan yang sangat luas tersebut. Di Jawa Tengah Belanda telah menderita kerugian 1500 serdadunya tewas.

Setelah penggabungan Yogyakarta ke dalam wilayah R.I(Republik Indonesia), Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara ketika Jakarta dianggap sudah tidak aman untuk mempertahankan Kemerdekaan R.I. Yogyakarta berperan penuh dalam mengamankan pemimpin-pemimpin nasional yang diancam oleh Belanda dengan melakukan agresi Militer Belanda II. Korban berjatuhan dari masyarakat Yogyakarta untuk membela Eksistensi RI dalam

⁴ Bumihangus merupakan sebutan untuk daerah yang dikuasai oleh Belanda

serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan strategi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan yang menjadi pelaksa adalah Letkol Soeharto⁵.

Sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat RI ke Yogyakarta. Yogyakarta merupakan suatu wilayah yang terletak di pedalaman Jawa, tepatnya pada bagian tengah sisi selatan Pulau Jawa. Sebelum menggabungkan diri dibawah RI, Yogyakarta merupakan suatu Kesultanan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, dimana Mataram Islam sendiri menurut Persetujuan Giyanti terbagi menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI tidak bisa dilepaskan dari Yogyakarta. Yogyakarta ditetapkan sebagai ibukota pemerintahan RI pada awal tahun 1946, Yogyakarta juga menyimpan sejarah yang sangat penting. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemimpin Yogyakarta itu sendiri, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan di Jakarta, Sri Sultan menyambutnya bersama Paku Alam VIII dengan pernyataan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari RI. Pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Soekarno dengan sambutan yang menyenangkan. Hubungan antara keduanya pun mulai terjalin. Hubungan yang baik itu dapat dipahami bahwa Sri Sultan

⁵ Yudianto, *Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan RI pada Masa Agresi Militer Belanda II(1948-1949)*. Skripsi, Yogyakarta: Pendidikan Sejarah, FISE, UNY, 2010, hlm.6.

ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun kecuali bangsa Indonesia menjadi merdeka dan Republik Indonesia dapat lestari

Sebelum Revolusi Kemerdekaan RI mengabdikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk tujuan prestise sosial yang melekat pada dirinya. Dorongan ekonomis sangat kecil. Maka pada bulan Maret 1949 Belanda melancarkan serangan besar-besaran dari arah utara terhadap Wonogiri-Gading yang menurut perkiraan Belanda adalah tempat markas besar Indonesia.⁶

Den Haag pada paruh kedua tahun 1948 untuk Indonesia yang baru, nama Republik Indonesia tidak tercantum. Rencana Belanda dibuat dengan suatu Indonesia terdiri dari sejumlah besar negara bagian sementara sudah ada sepuluh serta masa peralihan dengan sebuah “ Pemerintah Sementara “ yang mengatur pekerjaan dan yang dipengaruhi oleh Belanda.⁷

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia pernah memiliki 3 macam Undang-undang Dasar yang masing-masing memuat pasal-pasal yang mengatur tentang swapraja. Undang-undang Dasar ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan . pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Republik Indonesia Serikat yang mempunyai Undang – undangnya sendiri ialah Konstitusi RIS yang berlaku untuk seluruh

⁶ A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Bandung : Disjarah-Ad, 1976.hlm.74.

⁷ Heijboer Pierre, *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zambrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.hlm.112

Indonesia. Sumber hukum pembentukan Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman sebagai Swapraja menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah UUD 1945. Akan tetapi setelah RIS berdiri dan RI hanya menjadi Negara bagian daripada RIS, sejak berdiri RIS tersebut yang berlaku bagi seluruh Indonesia adalah Konstitusi RIS, sekalipun UUD 1945 masih berlaku, akan tetapi karena RI hanya merupakan Negara Bagian daripada RIS oleh karenanya Konstitusi RIS dengan sendirinya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada UUD 1945. Mengingat hal tersebut maka sejak berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, yang merupakan sumber hukum yang tertinggi bagi Swapraja adalah Konstitusi RIS.

Sebagai kerajaan kecil Kadipaten Pakualaman tidak berpeluang untuk berkembang. Memang itulah siasat kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, penindasan dan pemerasan yang kejam telah membangkitkan rasa senasib sepenanggungan di kalangan rakyat Indonesia hingga mematangkan Nasionalisme Indonesia. Tak terkecuali Sri Paku Alam VIII dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berdua tidak lagi berwawasan sempit berjuang demi kejayaan kerajaan masing-masing, namun sudah berwawasan nasional berjuang demi kejayaan Indonesia.⁸

Konflik RI-Belanda setelah kedatangan kembali pemerintah Hindia Belanda ternyata mendapat tanggapan dari dunia internasional. Inggris mendesak segera diadakannya perundingan gencatan senjata sebelum menarik

⁸ Soenjoto, *Dinamika Politik Di Yogyakarta Tahun 1946-1950*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2011. hlm.114

semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember 1946. Pada tanggal 12 November 1946 Indonesia untuk pertama kali diakui secara *de facto* dalam Perundingan Linggarjati.⁹ Hal ini merupakan alasan bagi beberapa negara adikuasa seperti Inggris dan AS untuk mengakui Indonesia secara *de facto*, menyusul beberapa negara seperti Mesir dan Yordania yang telah memberi pengakuan *de facto* dan *de jure*¹⁰ sebelum perjanjian Linggarjati.¹¹

Tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati¹² dengan melancarkan serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB

⁹ M.C. Ricklefs, "A History of Modern Indonesia", a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 337.

¹⁰ *De facto* dan *de jure* adalah Suatu standar *de facto* adalah suatu standar teknis atau lainnya yang sudah demikian lazim sehingga semua orang tampaknya mengikutinya seolah-olah itu adalah standar yang resmi. Standar *de jure* mungkin berbeda: contohnya adalah ngebut di jalan raya. Meskipun standar *de jure* menetapkan batas kecepatan tertentu atau yang lebih rendah, di banyak tempat standar *de facto*-nya adalah mengendarai pada batas kecepatan yang ditetapkan atau sedikit lebih cepat.

¹¹ G.M. Kahin, "Nationalism and Revolution In Indonesia", a.b. Nin Bakdi Soemanto, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : UNS Press dan Pustaka Harapan, 1995, hlm. 9.

¹² Perjanjian Linggar jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

turun tangan dengan membentuk *Commite of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri dari wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Perundingan dimulai kembali dan Persetujuan Renville disepakati pada bulan Januari 1948. Perundingan yang dilaksanakan di atas Kapal USS Renville tersebut ternyata belum final, masih dilanjutkan dengan perundingan-perundingan yang lain.

Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama. Belanda sangat tangkas melakukan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang dalam bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia.¹³ Kebuntuan antara kedua belah pihak membawa Belanda pada keputusan untuk melaksanakan aksi militer yang sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 1948, dimana hal tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua.

Pasukan Belanda mulai menyerang Yogyakarta dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Mula-mula mereka melumpuhkan lapangan udara Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pasukan mereka. Pesawat pembom dan penembak roket Belanda P. 51 dan *Spitfires* mulai menjinakkan Yogyakarta dengan serangan yang dilakukan oleh Brigade Marinir Belanda. Kekuatan militer Belanda secara cepat dapat menguasai Kota Yogyakarta.¹⁴

¹³ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Bandung : Disjarah dan Angkasa, 1979, hlm. 165.

¹⁴ G.M. Kahin, *op.cit.*, hlm. 427.

Kabinet RI segera bersidang untuk membahas serangan Belanda tersebut. Sebelum Presiden, Wakil Presiden beserta petinggi-petinggi yang lain ditawan oleh Belanda, dalam sidang telah diputuskan bahwa akan dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan TNI yang akan bergerilya dengan dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan judul di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi dan kondisi Yogyakarta pasca Kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana Peran Paku Alam VIII pada Peristiwa Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949 ?
3. Faktor- faktor apa yang melatar belakangi terjadinya Agresi militer Belanda II ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis, analitis, objektif dalam mengkaji suatu peristiwa.
 - b. Mengembangkan serta menambah karya penulisan ilmiah, terutama dalam bidang penulisan sejarah.
2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan kondisi Yogyakarta pasca-Kemerdekaan RI.
- b. Mendeskripsikan peran Sri Paku Alam VIII pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.
- c. Menganalisis faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Memberi tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI, khususnya pada masa Agresi Militer Belanda Kedua (1948).
- b. Sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan yang tercermin dari ketokohan seseorang

2. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan mengenai perjuangan Paku Alam VIII dalam mempertahankan kemerdekaan RI, khususnya pada saat Agresi Militer Belanda Kedua.
- b. Sebagai media melatih kemampuan penulis dalam menuangkan ide-ide ke dalam suatu karya sejarah yang objektif dan komprehensif.
- c. Guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁵ Hal ini dimaksudkan agar penulis memperoleh data-data atau informasi yang lengkap dari literatur mengenai permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan kajian pustaka, penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang relevan dengan objek penelitian sejarah yang akan dikaji.

Kebudayaan Jawa yang hidup di kota Yogyakarta merupakan peradaban orang Jawa yang berakar di keraton. Kebudayaan yang berkembang di keraton ini mempunyai suatu perjalanan sejarah yang panjang dan memiliki kesenian yang maju serta ditandai oleh suatu kehidupan keagamaan yang sangat sinkretis, campuran dari unsur-unsur agama Hindhu, Budha, dan Islam.¹⁶

Begitu mendengar Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memerintahkan K.R.T Hanggawangsa mengirim telegram Ucapan selamat kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta serta K.R.T. Rajiman Widyaningrat pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian disusul telegram yang menyatakan Sri Sultan dan Sri Sultan dan Paku Alam VIII siap berdiri dibelakang Republik.

¹⁵ Team Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi: Jenis Penelitian Historis, Kualitatif, dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, UNY, 2006, hlm.3

¹⁶ Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.25.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII masing-masing bertindak atas nama lembaganya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan Paku Alam VIII dengan Kadipaten Pakualaman, jadi bukan atas nama Pribadi, justru lebih luas lagi atas nama rakyat dan masyarakat. Pada waktu Revolusi Paku Alam VIII memberikan statement dimana tercantum bahwa penentuan daerah Yogyakarta adalah daerah bagian dari pada RI, ini ternyata mempunyai arti sangat penting secara politis.

Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 segera mendapat sambutan yang luar biasa. Salah satu sambutan yang luar biasa tersebut datang dari Yogyakarta. Melalui *Amanat Seripaduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Jogjakarta 5 September 1945*, Sri Sultan yang kemudian diikuti Paku Alam VIII menyatakan berdiri dibelakang Proklamasi Kemerdekaan RI. Dukungan Sri Sultan terhadap Proklamasi RI dinyatakan oleh Selo Soemardjan sebagai berikut.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, beliau sebagai Sultan HB IX, dalam kebebasannya akan membuatnya diketahui oleh dunia bahwa Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia, dengan status wilayah istimewa dan dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden¹⁷

¹⁷ Selo Soemardjan, In *Memorian : Hamengkubuwono IX, Sultan of Yogyakarta, 1912-1988.indonesia.No.47(April),1989,hlm.116.*

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai ke Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta terkejut dan belum percaya akan kemerdekaan Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama lagi, melalui surat telegram Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Moh. Hatta, serta di daerah Yogyakarta membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia). KNI dibentuk dengan tujuan merebut kekuasaan militer dan politik dari Jepang, serta membimbing rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah di raih.

Pada awal tahun 1946, pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut dikarenakan keadaan Jakarta yang tidak kondusif untuk pelaksanaan pemerintahan. Sri Sultan menyambut dengan baik rencana pemindahan ibukota tersebut. Rombongan para petinggi negara disambut langsung oleh Sri Sultan di Stasiun Tugu. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Sultan benar-benar setia kepada RI¹⁸.

Selama Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan terjadi Agresi Militer Belanda II, ibu kota Negara RI pindah ke Yogyakarta. Saat itu juga Yogyakarta menjadi kota perjuangan dan kota revolusi yang sangat penting bagi kelangsungan dan keberadaan bangsa Indonesia. Banyak pertempuran yang terjadi di Yogyakarta menimbulkan banyaknya korban dikalangan rakyat Yogyakarta. Daerah Yogyakarta pernah menjadi Ibu kota Negara dari masa kerajaan Mataram Islam

¹⁸ Siti Chamah Soeratno, *et.al. Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan YKII, 2001, hlm. 140.

Semangat, visi, dan komitmen kerakyatan dalam diri Sri Paku Alam VIII sebenarnya sudah terinternalisasi sejak Sri Paku Alam VIII masih kanak-kanak. Mengapa kelak di kemudian hari Sri Paku Alam VIII selalu berbahasa Jawa halus (*krama inggil*) dengan orang kebanyakan. Karena, sejak kecil sudah biasa bergaul dengan kehidupan di luar tembok kraton.

Sejak masa kecil sampai masa mudanya, Sri Paku Alam VIII yang lahir pada tanggal 10 April 1910 ini biasa bergaul dengan kawan-kawannya di luar istana. Ketika duduk di sekolah dasar (HIS), pemilik nama kecil Gusti Raden Mas Haryo Sularso Kuntosuratno ini biasa bermain sepak bola, *jamuran*, *dakon*, dan *gobag sodor* bersama teman-temannya dari kalangan rakyat biasa. Ia juga senang bermain *gelutan* (gulat) bersama mereka sambil berhujan-hujan.

Kecintaannya pada rakyat semakin kuat saat mulai menginjak dewasa. Ketika baru genap 2 tahun menuntut ilmu di *Rechts Hogere School* di Jakarta, Sri Paku Alam VIII dipanggil oleh ayahnya untuk pulang ke Jogja dan membantu pekerjaan di bidang pertanahan. Namun, Sri Paku Alam VIII memilih untuk bekerja di bidang agraria. Alasannya adalah supaya bisa bertatap muka dengan rakyat. Dengan pekerjaan itu, Sri Paku Alam VIII sering mendidik lurah-lurah dan carik-carik yang saat itu kebanyakan masih buta huruf.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajak Sri Paku Alam VIII berdiskusi tentang bagaimana sikap Yogyakarta terhadap RI. Waktu itu, Sri

Paku Alam VIII berkata kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX: "*Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik*" (Sebaiknya kita bergabung saja dengan Republik). Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun berkata: "*Yes, aku setuju!*" Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memanggil sekretarisnya (Kanjeng Raden Tumenggung Hanggawangsa) untuk mengirim telegram kepada Bung Karno yang berisi dukungan Kasultanan-Pakualaman Yogyakarta kepada RI.

Seandainya saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tidak bersehati untuk mendukung RI, sejarah akan menjadi lain. Apalagi, Belanda memberi tawaran kepada Sultan untuk menjadi Wali Nagari atas Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka pembangunan sebuah negara federal rancangan Belanda. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII sudah berbulat tekad untuk mendukung RI.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah rekonstruksi sejarah yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji melalui proses pengujian dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau.¹⁹ Historiografi yang Relevan dalam penulisan sejarah berisi mengenai kajian-kajian historis dengan tema atau topik yang

¹⁹ Louis Gottschalk, "Understanding History : A Primer of Historical Method", a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press, 1982, hlm. 94.

sama, yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan apa yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰

Skripsi karya Yudianto, Pendidikan Sejarah, FISE, UNY, 2010 yang berjudul “ Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan RI pada Masa Agresi Militer Belanda II(1948-1949), skripsi ini menjelaskan tentang kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda II yang terjadi di Yogyakarta. Dari pemikiran tersebut suatu Strategi dengan pelaksanaan berupa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Skripsi yang selanjutnya adalah karya Inna Felinda, Pendidikan Sejarah, FIS, UNY, 2011 yang berjudul “Dinamika Keistimewaan Yogyakarta(1945-1965).” Skripsi ini menjelaskan tentang terkait dengan keistimewaan yang disandang oleh Kasultanan Yogyakarta, keistimewaan tersebut sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram. Kasultanan Yogyakarta menganggap kerajaannya adalah terusan trah Mataram Islam. Yogyakarta dikatakan daerah yang istimewa dikarenakan ada beberapa hal yang menjadikannya sebagai ciri khas yaitu Yogyakarta sebagai kota budaya.

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan,tetapi Penulis membuat tulisan yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Hal-hal yang membedakan skripsi ini adalah berjudul “Peranan Paku Alam VIII dalam Agresi militer Belanda II tahun 1948-1949” yang lebih menekankan pada peranan Sri Paku Alam VIII dalam mempertahankan Kemerdekaan RI pada

²⁰ Tim Penyusun, *loc.cit.*

Agresi Militer Belanda II. Tulisan yang berjudul *Kadipaten Pakualaman*, karangan Soedarisman Poerwokoesoemo, diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta pada tahun 1985, mengkaji tentang sejarah berdirinya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dan Perkembangannya sampai meninggalnya Paku Alam VII. Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa pada waktu Kadipaten Paku Alaman belum berada di bawah pengaruh kebudayaan Barat.

Buku Karya Moedjanto dengan Judul *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman* secara khusus membahas mengenai lahirnya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dari disintegrasi Kolonial menjadi integrasi nasional. Dalam karya ini dibahas mengenai perkembangan Pakualaman sampai sekitar tahun 1900. Dalam perjalanannya sebagai suatu Kadipaten kecil, pakualaman tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah dirinya menjadi kerajaan besar. Dari karya ini dapat diketahui ada suatu pergeseran nilai- nilai tradisional dalam hal pendidikan.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Sejarah dapat didefinisikan sebagai rekontruksi masa lalu.²¹ Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam suatu penulisan sejarah setidaknya mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995, hlm.17

dan kritis. Metode sejarah menggunakan pendekatan khusus dalam penulisannya. Sehingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu manusia atau pelaku, tempat (ruang lingkup), waktu dan peristiwa atau aktifitas manusia itu sendiri. Untuk menghasilkan suatu karya sejarah yang bermutu, diperlukan suatu metode sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lampau. Penulisan sejarah mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis, kritis, ilmiah dan obyektif.

Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan, yaitu berikut ini.

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata *Heuriskein* yang berarti memperoleh atau menemukan. Heuristik disini merupakan kegiatan menghimpun jejak - jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah. Dalam melakukan kegiatan menghimpun jejak atau data-data sejarah,

Penulis berusaha mencari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan kajian untuk menyusun skripsi ini. Heuristik (pengumpulan data) merupakan kegiatan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti; buku, jurnal, majalah, koran dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi, perlu dicari sumber-sumbernya (bukti-bukti), baik sumber primer, sekunder, tersier maupun historis.

Tahap ini digunakan penulis untuk melakukan proses pencarian dan pengumpulan berbagai sumber literatur di berbagai perpustakaan di Yogyakarta, seperti; Perpustakaan UPT Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan St.Collage Ignatius, Perpustakaan Daerah Yogyakarta (Perpusda), Perpustakaan UPT I dan UPT II Universitas Gadjah Mada (UGM), Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Perpustakaan Sanata Dharma.

Sumber Sejarah menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

1. Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau menggunakan alat mekanik.²² Menurut Sidi Gazalba, sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan menggunakan panca inderanya atau alat mekanik.²³ Adapun sumber primer yang penulis gunakan dalam

²² Louis Gottschalk, *op. cit*, hlm.34.

²³ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1981, hlm.37.

menulis skripsi ini adalah arsip- Arsip yang berkaitan dengan peranan Paku Alam VIII dalam Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Siti Chamamah Soeratno. *Et.al.*(2001). *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan YKII

Khairudin H. (1995). *Filsafat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Liberty Team Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. (1992). *Profil Propinsi Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara substansial maupun secara fisik. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (*otentisitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*). Kritik ekstern digunakan untuk melihat otentisitas(keaslian) suatu sumber, agar dapat diperoleh sumber yang asli dan terkait dengan bentuk fisik dari sumber sejarah. Kritik intern lebih menekankan pada isi dokumen atau sumber sejarah (uji kredibilitas). Uji kredibilitas dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh isi informasi dari sumber sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya dengan cara mencocokkan dan membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya yang telah melalui kritik ekstern.

c. Interpretasi

Interpretasi (penafsiran) digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta telah didapat. Penafsiran data-data, diperoleh berdasarkan kekuatan analisis yang diperkuat melalui kajian pustaka dan segi peninjauan (politik, sosiologi dan psikologi). Dalam kegiatan interpretasi penulis berusaha menganalisis sumber-sumber yang ada, kemudian menyusun sumber-sumber tersebut dalam bentuk penulisan skripsi. Tahap intepretasi ini dibagi dalam dua langkah yaitu *analisis* dan *sintesis*. Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan sedangkan sistematis berarti mengumpulkan.

d. Historiografi

Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.

Dalam tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh sistematis, serta komunikatif. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasi dan kesimpulan. Tahap penyajian ini merupakan tahap akhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta kedalam bentuk tulisan skripsi.

Sumber sejarah ini merupakan pangkal tolak dari rekonstruksi yang akan dibangun dan diistilahkan sebagai modal dan rekayasa rekonstruksi sejarah, karena dengan sumber inilah dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang kemudian dijadikan sebagai dasar utama dalam menghidupkan peristiwa masa lampau.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkapkan suatu peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang dibahas dapat diungkapkan secara menyeluruh. Untuk lebih mempertajam dan memperjelas pembahasan skripsi ini, penulis memfokuskan pada pendekatan ekonomi, politik, sosiologi, psikologi dan militer.

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang mengkaitkan pandangan tentang ekonomi serta penggambaran ekonomi masyarakat dalam perkembangannya.²⁵ Sementara menurut Sidi Gazalba, tinjauan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi, sehingga dapat dipastikan hukum kaidah.

²⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1993, hlm. 5.

²⁵ Mohammad Hatta, *Pengantar Ke jalan Ekonomi Sosiologi*. Jakarta : Fransco, 1957, hlm. 55.

Pendekatan politik adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroiti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.²⁶ Pendekatan politik diperlukan untuk memahami kekuasaan, bagaimana kekuasaan diperlukan, digunakan, dan keputusan-keputusan yang dibuat manusia dalam proses menjalankan kekuasaan.²⁷ Hal ini dimaksudkan untuk melihat golongan mana yang paling berperan dalam suatu peristiwa, bagaimana hubungan dengan golongan lain, dan konflik berdasarkan ideologi dan sebagainya. Tinjauan sosiologi juga merupakan pendekatan yang sangat mementingkan peranan sosiologi didalam menjelaskan perilaku manusia.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi mengenai gambaran singkat isi yang akan ditulis. Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh memberikan gambaran

²⁶ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 4.

²⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Jakarta : Depdikbud, 1996, hlm.21

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Rajawali, 1985, hlm. 469.

secara ringkas. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas tentang kondisi Yogyakarta pasca-kemerdekaan Indonesia. Diperkuat dengan kondisi politik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi.

Bab ketiga akan membahas tentang latar belakang kehidupan Paku Alam VIII. Dibahas pula riwayat pendidikan hingga peran Sri Paku Alam VIII dalam Agresi Militer Belanda II. Sri Paku Alam VIII yang menempuh pendidikan di Belanda membuat dirinya benar-benar sadar dan paham akan watak penjajah bangsanya. Hal ini kelak sangat berguna dalam menghadapi pihak Belanda.

Bab keempat akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi Agresi Militer Belanda II. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh Paku Alam VIII beserta pemimpin-pemimpin pejuang yang lainnya dalam menunjukkan serta mendorong negara-negara lain untuk mendukung perjuangan RI, terlebih pasca Agresi Militer Belanda II. Di bagian ini juga akan dijelaskan mengenai Serangan Umum 1 Maret yang berhasil membawa perjuangan fisik menuju perundingan perdamaian. Keberhasilan ini tentu tak terlepas dari upaya Sri Sultan.

Bab Kelima adalah kesimpulan. Pada bab ini akan dikemukakan secara singkat, padat dan jelas jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan bukan merupakan ringkasan penelitian.